

LAPORAN TAHUNAN

2020
EDITION

LAPORAN

KETUA KOMITE KERJA

Sejak ditetapkan pertama kali pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan dua Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Basis Kas menuju Akrual dan SAP Basis Akrual), 24 Buletin Teknis (Bultek), dan 4 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP). Dalam



menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, KSAP mengikuti proses baku penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*).

Sepanjang tahun 2020, KSAP telah melakukan berbagai kegiatan penyusunan standar dan implementasinya antara lain melaksanakan dua kali kegiatan dengar pendapat (*public/limited hearing*) atas draf PSAP Pengaturan Bersama, draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi dan draf PSAP Agrikultur. Indonesia menghadapi pandemic Covid-19 sejak kasus pertama dilaporkan pada awal bulan Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini telah mengubah pelaksanaan kegiatan yang biasanya tatap muka menjadi kegiatan daring. Hal ini berlaku juga untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KSAP mulai bulan Maret 2020 dilaksanakan secara daring.

Sejalan dengan kebutuhan standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas, penyusunan standar akuntansi yang dilakukan KSAP merujuk pada standar akuntansi sektor publik internasional (*International Public Sector Accounting Standards*), serta standar akuntansi produk penyusun standar lain yang relevan.

Sejalan dengan visi dan misi KSAP yaitu mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selama satu tahun terakhir, KSAP juga memberikan fasilitasi konsultasi penerapan SAP kepada instansi pemerintah. Selama tahun 2020 KSAP telah mengeluarkan 12 surat jawaban

konsultasi dan telah dibukukan menjadi Buku Bunga Rampai SAP Tahun 2020. Instansi yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut sebagian besar berkonsultasi dengan topik Aset Tetap, Pendapatan, dan Badan Layanan Umum.

Dalam rangka publikasi standar, KSAP telah menerbitkan buku SAP 2020, Bultek serta Buku Bunga Rampai Tahun 2020. Buku-buku publikasian tersebut didistribusikan kepada pengguna standar baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Buku publikasian tersebut juga dapat diakses melalui situs web KSAP (www.ksap.org).

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa Laporan Tahunan KSAP ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP selama Tahun 2020 kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat, pelaksanaan kegiatan, dan capaian KSAP selama tahun 2020, serta rencana kegiatan tahun 2021.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga dalam setahun ini KSAP mampu menyelesaikan penyusunan beberapa standar sesuai target yang telah direncanakan.

Seperti pepatah yang menyebutkan tak ada gading yang tak retak, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan standar oleh KSAP. Kami harapkan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang dapat kami gunakan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya. Atas kerja sama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2021
Ketua Komite Kerja

Sumiyati



DAFTAR ISI

i

Laporan Ketua Komite Kerja

1

Profil KSAP

5

Tugas Pokok KSAP

7

Rencana Strategis KSAP

12

Capaian KSAP Tahun 2020

22

Rencana Kerja KSAP Tahun 2021

25

Penutup

Lampiran : Dokumentasi Kegiatan Tahun 2020

DAFTAR TABEL

7

Tabel 1. Daftar Keputusan
Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

14

Tabel 2. Daftar PSAP Lanjutan
Tahun 2019 dan Progress Penyusunan

18

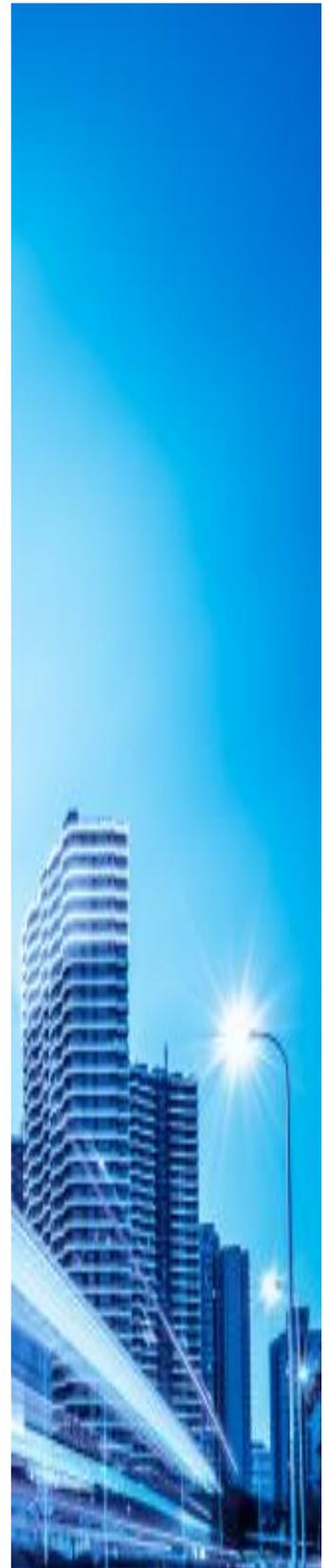
Tabel 3. Buku Bunga Rampai SAP
Tahun 2020

20

Tabel 4. Daftar Tamu KSAP 2020

20

Tabel 5. Rekapitulasi Kegiatan
KSAP Tahun 2020





PROFIL KSAP

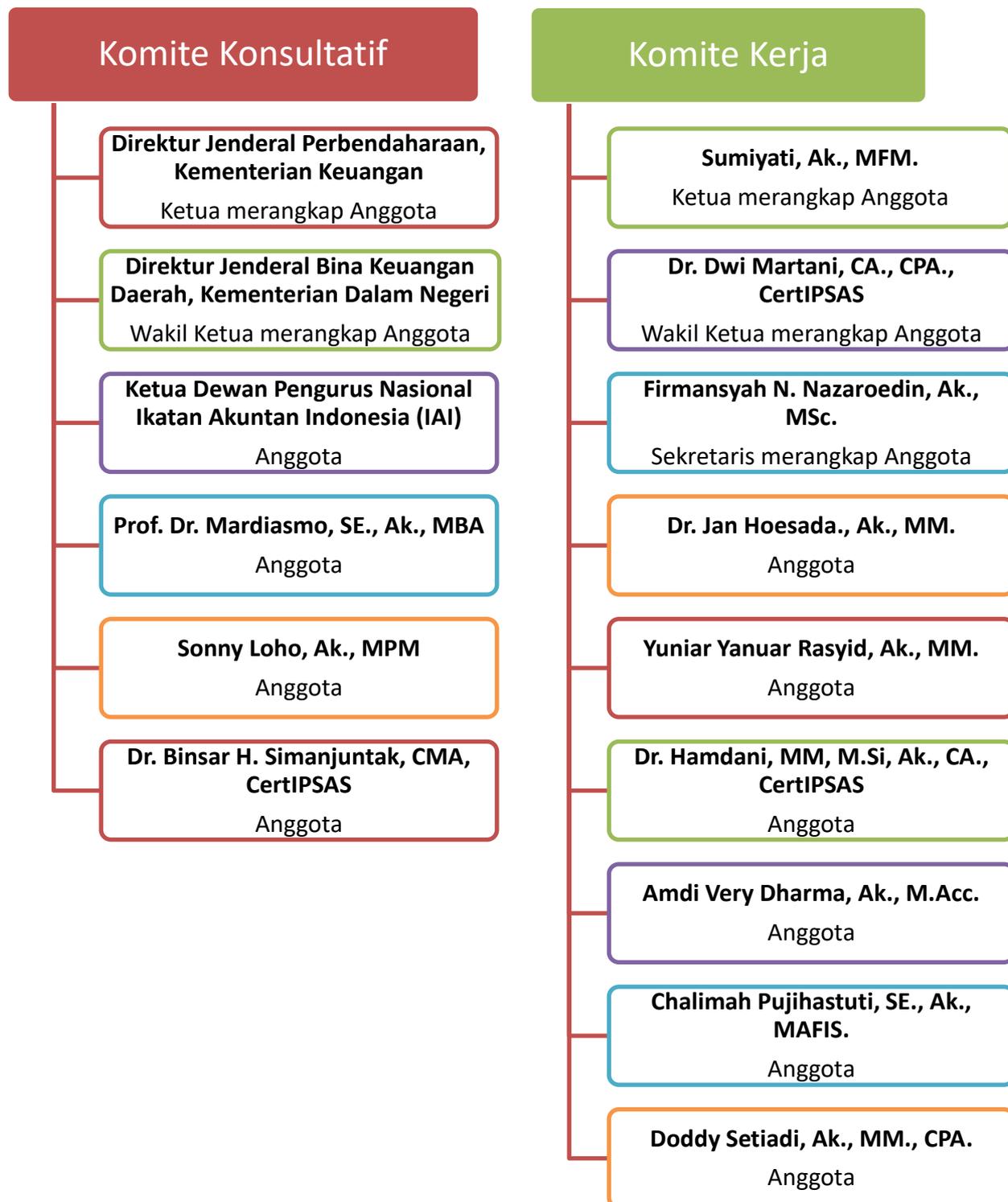
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Independen yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Pembentukan KSAP pertama kali dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2017.

KSAP adalah komite yang independen. KSAP beranggotakan para profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi pemerintahan, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik/pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas menyusun konsep RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2017 adalah:



Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP, Komite Kerja KSAP membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja.

Kelompok Kerja periode tahun 2020 dibentuk dengan KEP-01/K.1/KSAP/I

/2020 tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan KEP-08/K.1/KSAP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang beranggotakan 29 orang dan berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. **R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws.,** Ketua merangkap Anggota;
2. **Mega Meilistya, SE.Ak., MBA.,** Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. **Hamim Mustofa, Ak., CA.,** Anggota;
4. **Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA,** Anggota;
5. **Heru Novandi, SE, Ak., CA.,** Anggota;
6. **Muliani Sulya Fajarianti., SE., M.Ec.Dev., CA.,** Anggota;
7. **Zulfikar Aragani, SE. MM.,** Anggota;
8. **Lucia Widiarsanti, SE, M.Si., CFE, CA., CertIPSAS,** Anggota;
9. **Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, CA., CertIPSAS,** Anggota;
10. **Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA.,** Anggota;
11. **Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., CertIPSAS,** Anggota;
12. **Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., CertIPSAS,** Anggota;
13. **Dwinanto, SE.Ak.,** Anggota;
14. **Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA.,** Anggota;
15. **DR. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., CertIPSAS,** Anggota;
16. **Ananto Budiono, SE.,** Anggota;
17. **Rahadian Widagdo, SST., AK., M.Sc., CertIPSAS,** Anggota;
18. **Didied Ary Setyanang, SST., AK., M.Prof. Acc,** Anggota;
19. **Joko Tri Prasetyo, SST., AK., M. Acctg.Fin,** Anggota;
20. **Jona Maria Matow, SIP., M.Ak.,** Anggota.
21. **Budiman, SST., SE., Ak., MBA.,** Anggota.
22. **Januarti Tiuraida, SE., MM.,** Anggota.
23. **I Putu Sukma Hendrawan.,** Anggota.
24. **Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA.,** Anggota.
25. **Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE.Ak., CA.,** Anggota.
26. **Rahmat Mulyono, SE.Ak., M.Acc., CA.,** Anggota.
27. **Budi Mulyana, SE., M.Si.,** Anggota
28. **Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA.,** Anggota
29. **Yan Rahadian S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS.,** Anggota

Sesuai dengan Keppres KSAP bahwa KSAP dapat dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif.

Sekretariat KSAP Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 260/KMK.05/2020 tentang Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2020.

Susunan keanggotaan Sekretariat KSAP Tahun 2020

1. **Joni Afandi**, selaku Kepala Seksi Fasilitas KSAP,
2. **Zulfikar Aragani**, Anggota
3. **Harunsyah H. Galung**, Anggota;
4. **Nia Esti Wulansari**, Anggota;
5. **Ilham Akbar**, Anggota;
6. **M. Ikhsan Nasution**, Anggota;
7. **Gahara Djerja**, Anggota.

TUGAS POKOK

KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah

Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja mengikuti proses baku penyusunan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best practices*).

Proses baku penyusunan standar meliputi tahapan sebagai berikut:

Identifikasi Topik untuk dikembangkan menjadi Standar



Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

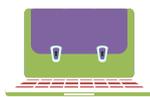


KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya.

Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja



Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang baik (*best practices*), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.



Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja.



Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

Draf yang telah disusun oleh Kelompok Kerja dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini, diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi.



Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.



Peluncuran Draf SAP (*Exposure Draft*)

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada *stakeholders*, antara lain masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan.



Dengar Pendapat Publik Terbatas (*Limited Public Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

Dengar pendapat dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu dengar pendapat publik terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian.

Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP.



Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat publik terbatas, dengar pendapat publik dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf SAP.



Finalisasi Standar

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Di samping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi, maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

RENCANA STRATEGIS



Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 16 Oktober 2017.



Tabel 1
Daftar Keputusan Presiden tentang KSAP

NO.	KEPPRES NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1.	84 Tahun 2004	5 Oktober 2004	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
2.	2 Tahun 2005	4 Januari 2005	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
3.	3 Tahun 2009	2 Maret 2009	Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
4.	21 Tahun 2013	12 Juli 2013	Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
5.	30 Tahun 2016	5 September 2016	Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84

		Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
6.	28 Tahun 2017	16 Oktober 2017
		Perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dalam penyusunan SAP, KSAP menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari BPK, KSAP memberikan tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum SAP ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan peralihan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (*accrual basis accounting*) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003

ditetapkan atau pada tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas menuju akrual. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka menuju penerapan *accrual basis accounting*, selanjutnya KSAP menyusun SAP berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan secara implisit memberikan mandat kepada KSAP untuk mengembangkan SAP. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

DASAR HUKUM KSAP

KSAP memiliki visi sebagai berikut:

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."

VISI & MISI KSAP

Misi utama KSAP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong pihak-pihak yang berkepentingan mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan pemerintah.

Nilai Dasar



Independen

Anggota KSAP menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu demi kepentingan semua pihak.



Profesionalisme

Anggota KSAP membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kode etik yang berlaku.



Demokratis

Anggota KSAP menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan kemufakatan dalam pengambilan keputusan.



Universal

Anggota KSAP membangun Standar Akuntansi Pemerintahan bersikap objektif dengan mengedepankan universalitas agar dapat diterapkan semua entitas pelaporan dan diterima oleh para pemangku kepentingan.

Tujuan, Sasaran, dan Kegiatan Strategis

Tujuan Strategis:

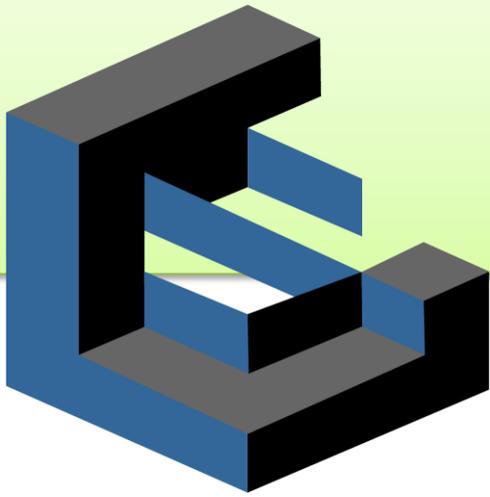
1. Menyusun standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik, dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat informasi laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan menjaga independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia yang dapat diterapkan oleh entitas pelaporan dan memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
2. Tersedianya interpretasi dan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan.
3. Terbangunnya kesamaan visi untuk peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan ketaatan entitas pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Meningkatkan Profesionalisme anggota KSAP.
6. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi KSAP dengan para pemangku kepentingan.

Kegiatan Strategis

1. Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyusunan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penyusunan Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
5. *Limited Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. *Public Hearing* Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. *Training of Trainers/ Workshop/ Sosialisasi* awal PSAP dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Permintaan Pertimbangan PSAP ke Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Pelayanan publik terkait akuntansi pemerintahan.
10. Pengembangan sumber daya manusia KSAP.
11. Pemeliharaan situs web KSAP (www.ksap.org).
12. Penyelenggaraan helpdesk KSAP.
13. Komunikasi publik.
14. Audiensi dengan Komite Konsultatif dan/atau Menteri Keuangan.
15. Penyelenggaraan Kesekretariatan.



CAPAIAN

TAHUN 2020

Kegiatan penyusunan standar dan buletin teknis tahun anggaran 2020 meliputi:

1. Draf PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan telah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.
2. Draf PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi serta Operasi yang Dihentikan telah diberikan pertimbangan oleh BPK melalui surat nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 dan pada akhir tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020).
3. Draf PSAP Perjanjian Konsesi Jasa dan Draf PSAP Properti Investasi telah diberikan pertimbangan oleh BPK agar dirumuskan ulang melalui surat nomor 56/S/I/04/2020 dan 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020. Kedua Draf PSAP tersebut telah dirumuskan ulang dan dikirimkan kembali ke BPK melalui surat nomor S-1074/MK.05/2020 tanggal 23 November 2020.
4. Draf PSAP Sewa telah diberikan pertimbangan oleh BPK melalui surat nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 agar menunggu terbitnya ED IPSAS Lease menjadi IPSAS.

5. Draf PSAP Pengaturan Bersama, dan Draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi telah dilaksanakan *public hearing* pada tanggal 16 September 2020 dan dalam proses otentifikasi oleh Komite Kerja.
6. Draf PSAP Agrikultur masih dalam perbaikan setelah dilaksanakan *public hearing* pada tanggal 25 November 2020.
12. Penyusunan 17 (tujuh belas) draf PSAP, yang terdiri dari:
 - a) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Kerja;
 - b) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan – Penyajian;
 - c) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran;
 - d) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen Keuangan – Pengungkapan;
 - e) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengungkapan Pihak Berelasi;
 - f) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penurunan Nilai Aset yang Tidak Menghasilkan Kas
 - g) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas;
 - h) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi dalam Entitas Lain dan *Joint Venture*;
 - i) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Sosial;
 - j) Draf Revisi Kerangka Konseptual;
 - k) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan;
 - l) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran;
 - m) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Revisi PSAP 07 Aset Tetap;
 - n) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengaruh Perubahan Valas;
 - o) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Biaya Pinjaman;
 - p) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Pengungkapan Informasi Sektor Pemerintah Umum; dan
 - q) Draf Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Analisis Laporan Keuangan.
8. Dua Buletin Teknis Akuntansi Pemerintahan dalam proses otentifikasi yang terdiri dari:
 - a) Draf Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir Akrual yang akan menggantikan Buletin Teknis Nomor 07 Akuntansi Dana Bergulir; dan
 - b) Draf Buletin Teknis Akuntansi Badan Layanan Umum.

9. Penyusunan Bunga Rampai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Draf Pernyataan Standar Akuntansi

Dalam tahun 2020, progres 8 (delapan) buah Draf PSAP yang merupakan kelanjutan dari penyusunan tahun 2019, yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini.



Tabel 2

Daftar PSAP Lanjutan Tahun 2019 dan Progres Penyusunan

No	PSAP	Keterangan per akhir Tahun 2020
1	PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	Telah ditetapkan melalui PMK Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
2	PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi serta Operasi yang Dihentikan	Telah diberikan pertimbangan oleh BPK melalui surat nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 dan pada akhir tahun 2020 masih dalam proses penetapan PMK
3	PSAP Pengaturan Konsesi Jasa	Perubahan judul menjadi PSAP Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi Telah diberikan pertimbangan oleh BPK agar dirumuskan ulang melalui surat nomor 56/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020. Draf PSAP tersebut telah dirumuskan ulang dan dikirimkan kembali ke BPK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1074/MK.05/2020 tanggal 23 November 2020.
4	PSAP Properti Investasi	Telah diberikan pertimbangan oleh BPK agar dirumuskan ulang melalui surat nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020. Draf PSAP tersebut telah dirumuskan ulang dan dikirimkan kembali ke BPK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1074/MK.05/2020 tanggal 23 November 2020.
5	PSAP Sewa	Telah diberikan pertimbangan oleh BPK melalui surat nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020 agar menunggu terbitnya ED IPSAS Lease menjadi IPSAS

6	PSAP Pengaturan Bersama	Telah dilaksanakan <i>public hearing</i> pada tanggal 16 September 2020 dan dalam proses otentifikasi oleh Komite Kerja
7	PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi	Telah dilaksanakan <i>public hearing</i> pada tanggal 16 September 2020 dan dalam proses otentifikasi oleh Komite Kerja
8	PSAP Agrikultur	Draf PSAP masih dalam perbaikan setelah dilaksanakan <i>public hearing</i> pada tanggal 25 November 2020.

Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2020, KSAP telah selesai menyusun 2 (dua) buah buletin teknis akuntansi pemerintahan dan dalam proses otentifikasi yaitu:

- a) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Dana Bergulir – Akrua
- b) Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Badan Layanan Umum

Sosialisasi, Public Hearing dan Limited Hearing SAP Berbasis Akrua dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Akrua

Sebagai bagian dari *due process* penyusunan standar, pada tahun 2020, KSAP melaksanakan *Public Hearing* atas *draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Public Hearing:

- **PSAP Pengaturan Bersama & PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi** tanggal 4 September 2020
- **PSAP Agrikultur** tanggal 25 November 2020

Pengembangan Sumber Daya Manusia KSAP

Dalam rangka peningkatan kapasitas, anggota KSAP juga mengikuti seminar/kongres/ konferensi. Kegiatan seminar yang diikuti oleh KSAP tersebut yaitu :

1. Pertemuan IPSASB CAG Virtual pertama tahun 2020

Pertemuan International Public Sector Accounting Standards Boards Consultative Advisory Group (IPSASB CAG) tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya wabah Covid-19 menyebabkan pertemuan IPSAS CAG dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh 30 anggota dari seluruh penjuru dunia. Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Indonesia dihadiri oleh Bapak Firmansyah N. Nazaroedin.

Pertemuan IPSAS CAG kali ini membahas tiga agenda utama yaitu proyek penyusunan standar, dampak Covid-19, dan program kerja IPSAS Board tahun 2020. Acara yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut juga membahas mengenai isu implementasi dan tantangan standar akuntansi sektor publik di berbagai negara dunia terutama di masa pandemi ini.

2. Pertemuan IPSASB CAG Virtual kedua tahun 2020

Pertemuan International Public Sector Accounting Standards Boards Consultative Advisory Group (IPSASB CAG) kedua tahun 2020 dilaksanakan secara virtual pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 09.00 waktu Toronto, Kanada. KSAP yang diwakili oleh Sekretaris Komite Kerja, Bapak Firmansyah N. Nazaroedin. Dalam beberapa tahun terakhir, KSAP secara aktif terus memberikan pandangan dan masukan terkait isu implementasi dan tantangan penyusunan standar akuntansi di masa mendatang.

Pemeliharaan Helpdesk KSAP

Pemeliharaan Situs web KSAP

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah memiliki *situs web* dengan alamat <http://www.ksap.org>.

Situs web KSAP dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004.

Pengembangan *situs web* ditujukan untuk memublikasikan seluruh produk yang dihasilkan KSAP, artiket, kegiatan KSAP, serta berbagai informasi penting lainnya. Pada Tahun 2020, telah dilakukan penyempurnaan konten *situs web* KSAP tersebut, dimulai dengan *update* profil KSAP, dan *update* produk KSAP yang meliputi Bultek, Bunga Rampai, serta Laporan Tahunan KSAP.

Bunga Rampai KSAP

Selain menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menerima pertanyaan atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna standar. Terhadap pertanyaan tersebut, selanjutnya KSAP memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Berbagai

pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasi ke dalam Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang berisi pertanyaan/permasalahan serta jawaban/pemecahan yang terkait dengan implementasi SAP.

Selama tahun 2020, KSAP telah menjawab 12 (dua belas) pertanyaan dari para pemangku kepentingan serta Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19, yang terkompilasi dalam:

- a. Buku Bunga Rampai SAP Semester I yang berisikan 10 Pertanyaan dan Jawaban KSAP; dan
- b. Buku Bunga Rampai SAP Semester II yang berisikan 2 Pertanyaan dan Jawaban KSAP serta Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19.



Tabel 3
Buku Bunga Rampai SAP Tahun 2020

No.	Nomor Surat	Instansi	Perihal
1	S-14/K.1/KSAP/I/2020	Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaporan Keuangan BLUD: Obyek Pajak
2	S-15/K.1/KSAP/I/2020	Kabupaten Musi Banyuasin	Pelaporan Keuangan BLUD, ATB
3	S-20/K.1/KSAP/I/2020	Kementerian Dalam Negeri	Akuntansi Dana BOS langsung dari RKUN ke Sekolah
4	S-21/K.1/KSAP/I/2020	Kabupaten Tasikmalaya	Penyajian Kas Daerah
5	S-24/K.1/KSAP/II/2020	Kabupaten Subang	Akuntansi Tanah Pihak Ketiga
6	S-31/K.1/KSAP/III/2020	Komite Nasional Hak Asasi Manusia	Akuntansi Tanah
7	S-48/K.1/KSAP/VI/2020	Pemerintah Kota Tangerang	Akuntansi LRA
8	S-49/K.1/KSAP/VI/2020	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Akuntansi LRA
9	S-50/K.1/KSAP/VI/2020	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Akuntansi Kewajiban
10	S-51/K.1/KSAP/VI/2020	Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	Akuntansi Tanah dan Persediaan
11	-	-	Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19
12	S-58/K.1/KSAP/VIII/2020	Pemerintah Kabupaten Brebes	Akuntansi Aset Tetap
13	S-79/K.1/KSAP/XII/2020	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI	Penjelasan atas Pencatatan Barang Milik Negara

Layanan Publik

Pada tahun 2020, KSAP juga memberikan layanan untuk menjadi narasumber SAP yang berasal dari permintaan berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya, yaitu:



1. Bimbingan Teknis Akuntansi Publik terkait Penyusunan Laporan Operasional (LO) pada tanggal 20 Februari 2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
2. Focus Group Discussion Mekanisme Pengakuan Aset Tak Berwujud pada tanggal 8 September 2020 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jederal Kementerian Keuangan.
3. Focus Group Discussion PSAP Perjanjian Konsesi Jasa pada tanggal 17 September 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Coaching Clinic Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan.
5. Training of Trainers Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13 November 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Komunikasi Publik

Pada awal Maret 2020 pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal ini mengakibatkan perubahan pada kegiatan pemerintahan. Kegiatan yang biasa diselenggarakan secara langsung atau luring berubah menjadi kegiatan daring. Sepanjang tahun

2020, KSAP hanya menerima 3 tamu yang berkunjung secara langsung ke sekretariat KSAP, yaitu dari beberapa *stakeholders* pemerintah daerah yang mengkonsultasikan beberapa permasalahan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Tabel 4
Daftar Tamu KSAP 2020

NO.	TANGGAL	INSTANSI	TEMA KONSULTASI
1.	5 Februari 2020	Pemerintah Provinsi Banten	Konsultasi dan koordinasi bimbingan teknis SAP
2.	21 Februari 2020	Pemerintah Kabupaten Kepulauan ARU	Konsultasi terkait Standar Akuntansi Pemerintahan
3.	28 Februari 2020	Pemerintah Kabupaten Kepulauan ARU	Konsultasi terkait laporan keuangan

Lain-Lain (Penyelenggaraan Kesekretariatan)

Sepanjang tahun 2020, Sekretariat KSAP telah memfasilitasi pelaksanaan rapat sebanyak 90 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5
Rekapitulasi Kegiatan KSAP Tahun 2020

RAPAT KSAP	FREKUENSI
Rapat Pleno	38 Kegiatan
Rapat Pleno Komsul	4 Kegiatan
Public/Limited Hearing	2 Kegiatan
FGD/Rapat Tim	46 Kegiatan
Total	90 Kegiatan

Lain-lain

Tahun 2020, KSAP melakukan pencetakan produk-produk KSAP yang disebarluaskan kepada para stakeholder yaitu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. Atas hal dukungan keuangan, tingkat realisasi anggaran Fasilitas KSAP mencapai realisasi sebesar Rp3.477.367.822,- yaitu 96,86% dari pagu sebesar Rp3.589.964.000,-.





RENCANA KERJA

TAHUN 2021

A. Penyusunan PSAP

Sesuai dengan proses baku penyusunan SAP (*due process*), draf standar yang telah selesai disusun oleh KSAP selanjutnya dimintakan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pertimbangan dari BPK, selanjutnya KSAP akan melakukan finalisasi atas draf standar dan selanjutnya melaporkan penyelesaian draf standar tersebut kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapannya.

Pada tahun 2021, KSAP akan melanjutkan penyelesaian draf PSAP yang telah berjalan. Draft PSAP yang akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2021 adalah:

1. PSAP Imbalan Kerja
2. PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian
3. PSAP Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran
4. PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan
5. PSAP Pengungkapan Pihak Berelasi
6. PSAP Penurunan Nilai Aset yang tidak Menghasilkan Kas
7. PSAP Penurunan Nilai Aset yang Menghasilkan Kas
8. PSAP Investasi dalam Entitas Lain dan Joint Venture
9. PSAP Imbalan Sosial
10. Revisi Kerangka Konseptual
11. Revisi PSAP 01 Penyajian atas Laporan Keuangan
12. Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
13. Revisi PSAP 07 Aset Tetap
14. PSAP Pengaruh Perubahan Valas
15. PSAP Biaya Pinjaman
16. PSAP Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintah Umum
17. PSAP Analisis Laporan Keuangan

B. *Limited Public Hearing* dan *Public Hearing* SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis AkruaI

Sesuai proses baku penyusunan standar (*due process*), *limited hearing* dan *public hearing* diperlukan dalam rangka dengar pendapat publik guna memperoleh tanggapan dan masukan dalam rangka penyempurnaan *draft* SAP dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Pada tahun 2021, KSAP merencanakan pelaksanaan *hearing* sebagai berikut:

Limited Hearing

1. PSAP Imbalan Kerja
2. PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian
3. PSAP Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran
4. PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan
5. PSAP Pengungkapan Pihak Berelasi
6. PSAP Investasi dalam Entitas Lain dan Joint Venture
7. PSAP Imbalan Sosial
8. Revisi Kerangka Konseptual
9. Revisi PSAP 01 Penyajian atas Laporan Keuangan
10. Revisi PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
11. Revisi PSAP 07 Aset Tetap
12. PSAP Pengaruh Perubahan Valas
13. PSAP Biaya Pinjaman

Public Hearing

1. PSAP Imbalan Kerja
2. PSAP Instrumen Keuangan – Penyajian
3. PSAP Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran
4. PSAP Instrumen Keuangan – Pengungkapan
5. PSAP Pengungkapan Pihak Berelasi

C. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis AkruaI, diperlukan peningkatan kapasitas bagi anggota KSAP. Peningkatan kapasitas diantaranya dilakukan dengan

peningkatan kajian standar dan praktik akuntansi baik internasional maupun nasional, serta keikutsertaan anggota KSAP pada seminar/kongres/konferensi akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri.



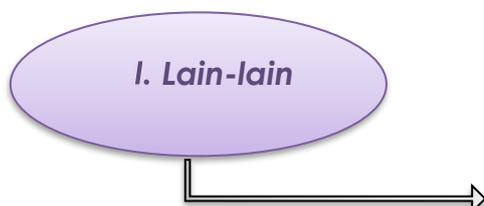
Sejak tahun 2004, KSAP telah membuat situs web KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai organisasi, kegiatan dan output KSAP. Situs web tersebut senantiasa dilakukan pemeliharaan agar tetap dapat mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan kegiatan KSAP kepada publik. Pengunjung situs web dapat *men-download* dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs

Disamping menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP juga melayani konsultasi terkait dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas berbagai pertanyaan dan jawaban tersebut, selanjutnya dikodifikasikan dalam suatu buku Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.



Kegiatan sosialisasi dan layanan publik terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan dalam bentuk pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengguna SAP serta mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

Audiensi dengan komite Konsultatif dan/atau dengan Menteri Keuangan merupakan salah satu sarana perwujudan pertanggungjawaban kegiatan KSAP kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.



Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan untuk memberikan dukungan terhadap kinerja KSAP di tahun 2021

P.E.N.U.T.U.P.



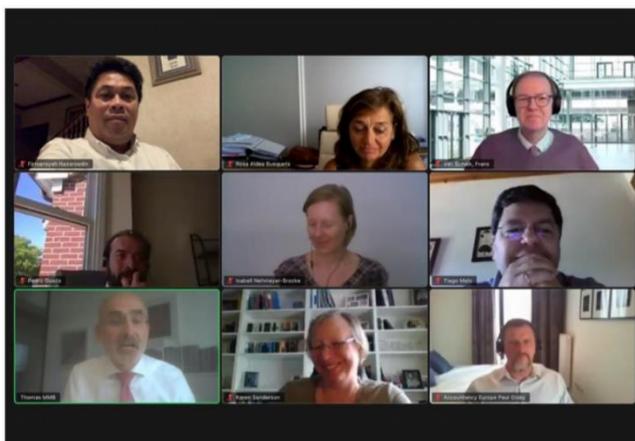
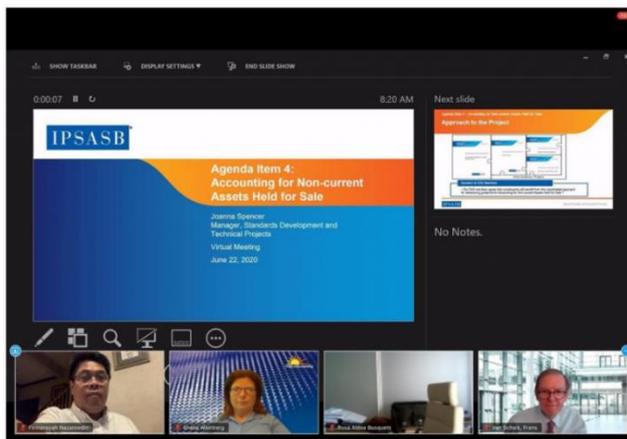
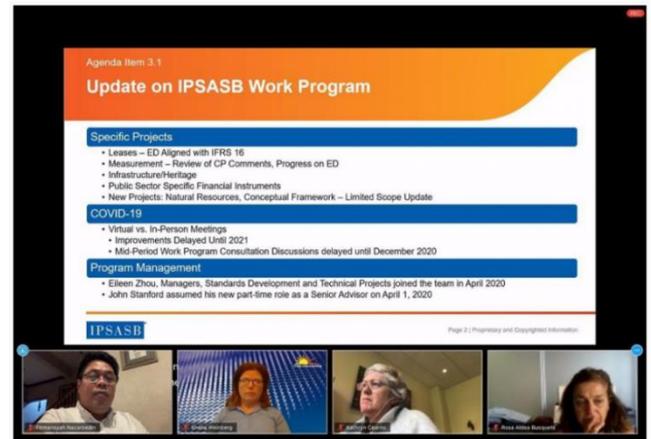
Laporan Tahunan 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP. laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik yang terkait dengan substansi standar, interpretasi standar, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat memberikan dukungan teknis implementasi untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

DOKUMENTASI TAHUN 2020



Pertemuan IPSASB CAG Virtual pertama tahun 2020

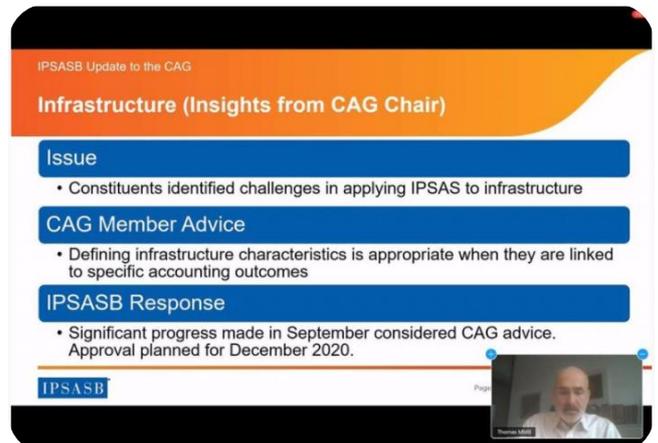
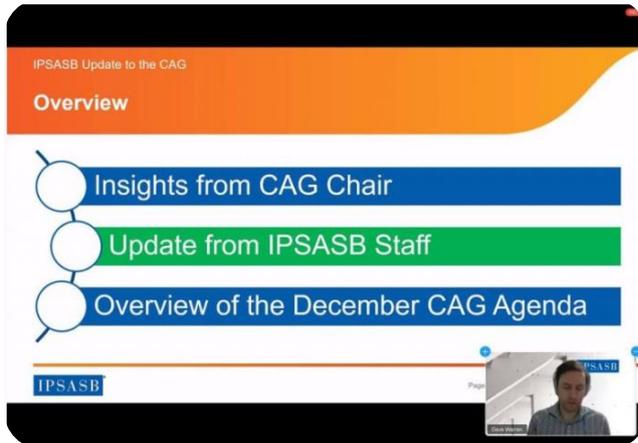
22 Juni 2020



DOKUMENTASI TAHUN 2020



Pertemuan IPSASB CAG Virtual kedua tahun 2020
29 Oktober 2020

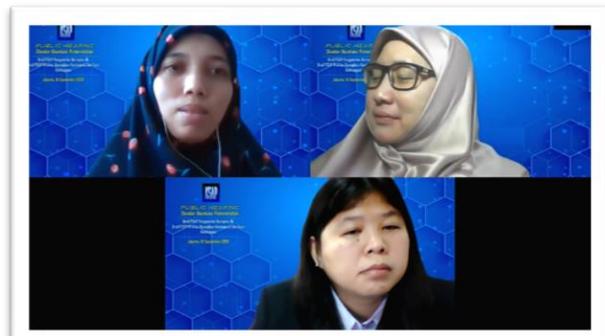


DOKUMENTASI TAHUN 2020



Public Hearing Draft PSAP Pengaturan Bersama & Draft PSAP Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi

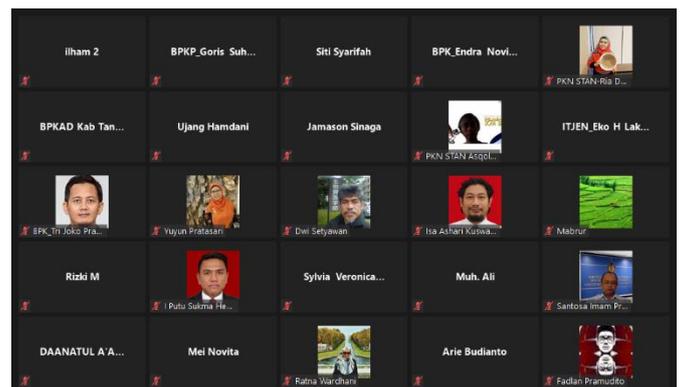
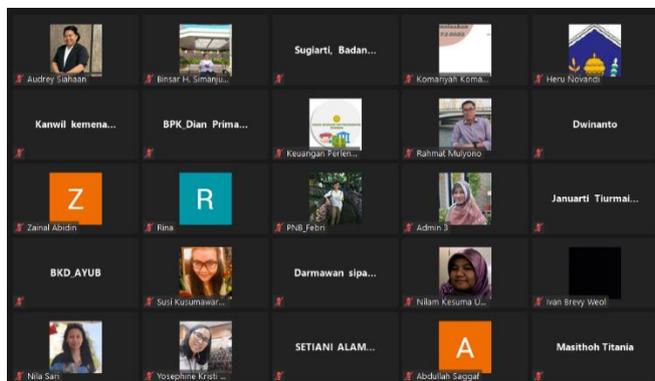
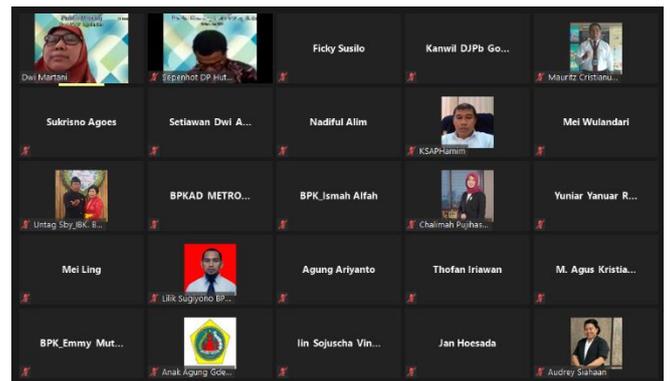
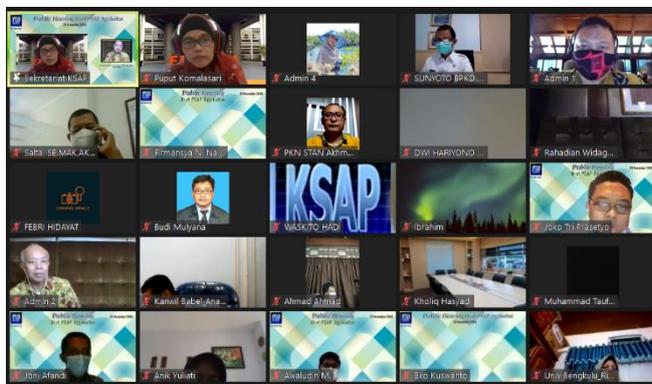
Jakarta, 16 September 2020



DOKUMENTASI TAHUN 2020



Public Hearing PSAP Agrikultur Jakarta, 25 November 2020



DOKUMENTASI TAHUN 2020



Rapat Pleno Komite Konsultatif

1 Juli 2020



DOKUMENTASI TAHUN 2020



Rapat Pleno Komite Konsultatif

2 Desember 2020



DOKUMENTASI TAHUN 2020



Rapat Pleno KSAP

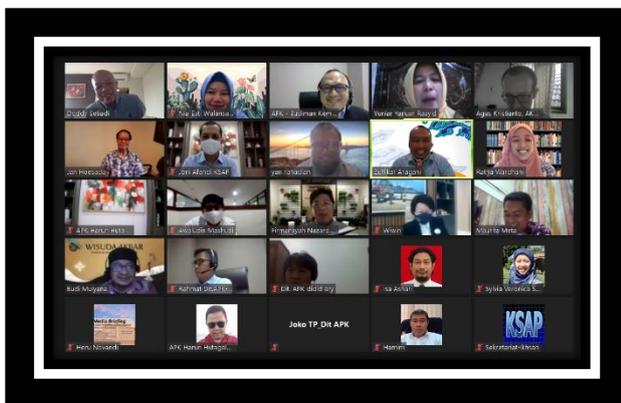
Sepanjang tahun 2020



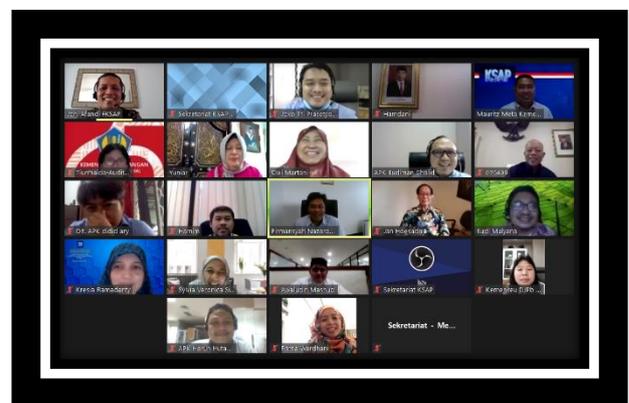
Pleno 15 April 2020



Pleno 24 Juni 2020



Pleno 14 Oktober 2020



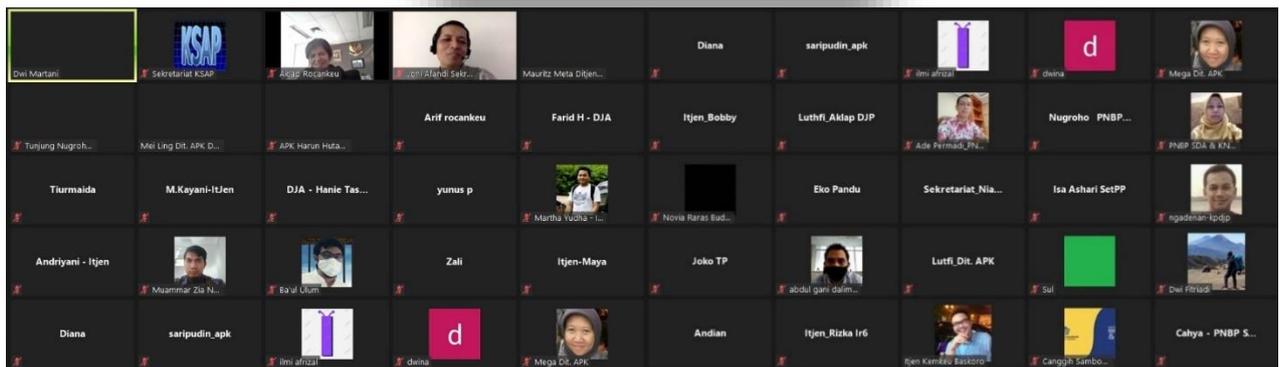
Pleno 16 Desember 2020

DOKUMENTASI TAHUN 2020



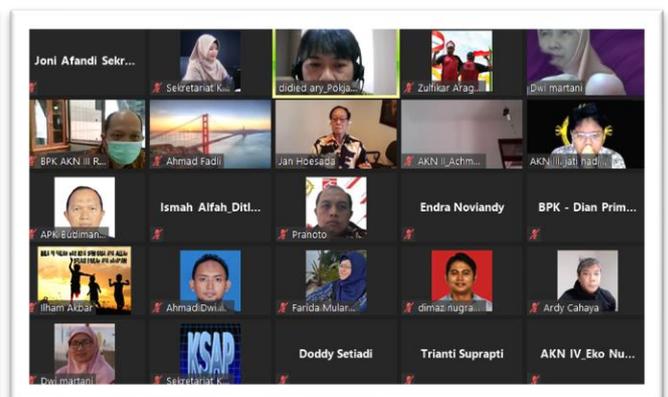
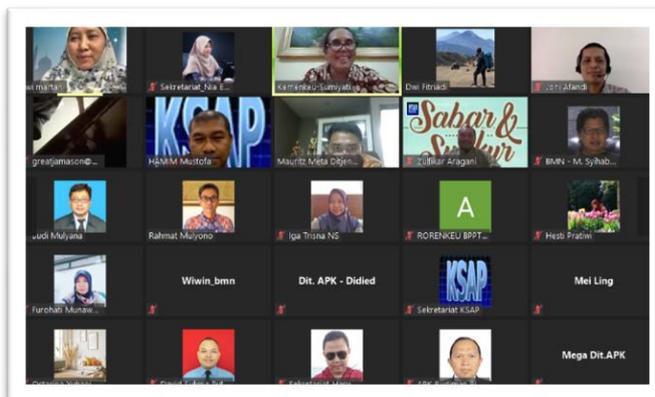
Kegiatan Lainnya

Focus Group Discussion (FGD) Draft PSAP



FGD Agrikultur

FGD Konsesi Jasa

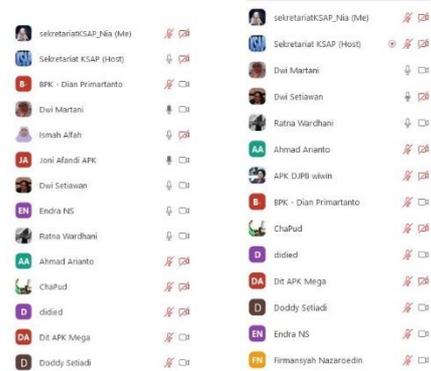


DOKUMENTASI TAHUN 2020



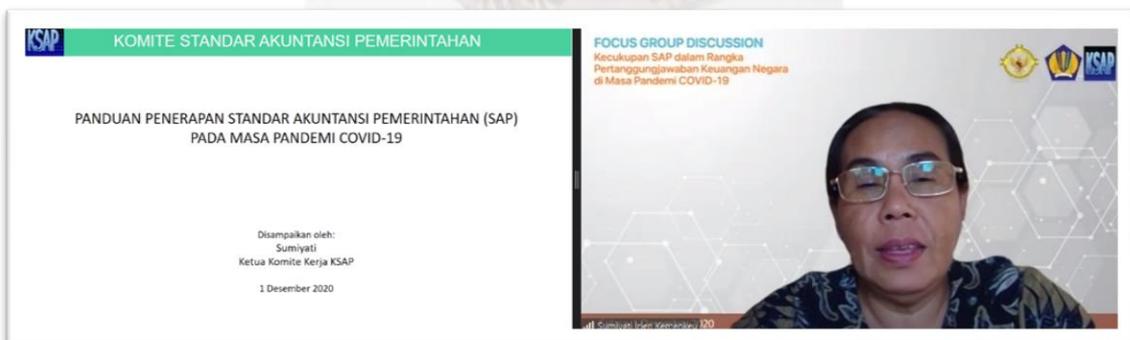
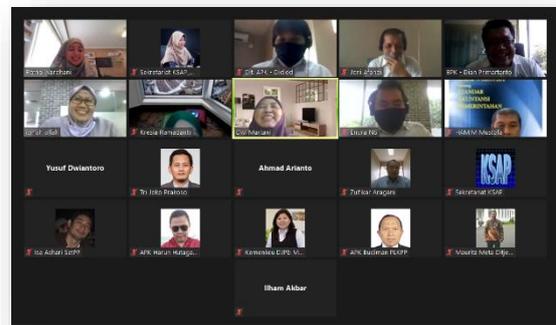
Kegiatan Lainnya

FGD dengan Badan Pemeriksa Keuangan



FGD
Draf PSAP Properti Investasi dan
Pengaturan Konsesi Jasa
(lanjutan)

27 Juli 2020





Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon: +62 21 3449230 Ext. 5311
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

